

**PENDIDIKAN**

**LAPORAN PENELITIAN  
HIBAH BERSAING**



**PENGEMBANGAN MODEL PEREKONOMIAN KOPERASI  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MELALUI  
PENINGKATAN PERAN KOMITE SEKOLAH  
DI KOTA BANDARLAMPUNG**

**Dr. Erlina Rufaidah, M. Si  
Drs. Yon Rizal, M. Si  
Prof. Dr. Wan Abbas Zakaria, M.Si.**

**UNIVERSITAS LAMPUNG  
2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : PENGEMBANGAN MODEL PEREKONOMIAN  
KOPERASISEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
MELALUI PENINGKATAN PERAN KOMITE  
SEKOLAH DALAM PROGRAM BINA  
LINGKUNGANDI KOTA BANDARLAMPUNG

**Peneliti/Pelaksana**  
Nama Lengkap : Dr. ERLINA RUFAIDAH Dra. M.Si  
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung  
NIDN : 0028065807  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Pendidikan Ekonomi  
Nomor HP : 081293228795  
Alamat surel (e-mail) : atin\_lin@yahoo.com

**Anggota (1)**  
Nama Lengkap : Prof. Dr. Ir. WAN ABAS ZAKARIA M.S.  
NIDN : 0026086105  
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung

**Anggota (2)**  
Nama Lengkap : Drs. YON RIZAL M.Si.  
NIDN : 0018026006  
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung  
Institusi Mitra (jika ada) : -  
Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 50.000.000,00  
Biaya Keseluruhan : Rp 50.000.000,00

Mengetahui,  
Ketua LPPM Unila,  
  
(Dr. Eng. ADMI SYARIF)  
NIP/NIK 196701031992031003

Bandar Lampung, 9 - 7 - 2015  
Ketua,

  
(Dr. ERLINA RUFAIDAH Dra. M.Si)  
NIP/NIK 195808281986012001

# **PENGEMBANGAN MODEL PEREKONOMIAN KOPERASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MELALUI PENINGKATAN PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PROGRAM BINA LINGKUNGAN DI KOTA BANDARLAMPUNG**

**Erlina Rufaidah, Yon Rizal, Abdurrahman**

## **ABSTRAK**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk (a) mengembangkan Model Perekonomian Koperasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui optimalisasi peran komite sekolah di kota Bandarlampung; dan (b) menerapkan Model Perekonomian Koperasi yang didesain untuk meningkatkan kualitas individu dan sekolah secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (*Research and Development*) yang dikembangkan oleh Brog and Gall yang dilaksanakan dalam dua tahun kegiatan. *Tahun pertama*: tahap pengembangan model, berdasarkan data yang diperoleh pada seminar model awal, merancang model awal, melakukan studi banding, merevisi, dan menghasilkan model perekonomian koperasi sekolah melalui peningkatan peran komite sekolah. *Tahun kedua*: mensosialisasikan model perekonomian koperasi sekolah, melakukan uji coba model, memvalidasi dan merevisi model, mengimplementasikan model. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terbentuknya model perekonomian koperasi sekolah menengah pertama di kota metro. Dengan hasil ini kiranya dapat menjadi benchmark untuk sekolah lain dalam membentuk mode koperasi.

**Kata Kunci;** Perekonomian Koperasi, Peran Komite Sekolah, Program Bina Lingkungan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Didalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 044/U/2002, menjelaskan bahwa Komite Sekolah merupakan badan independen yang mengkomodir peran serta masyarakat dalam meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pengelolaan pendidikan dalam satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Peran Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah diantaranya adalah membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolahraga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya (Depdiknas, 2001:17).

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:(1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.(2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan / organisasi / dunia usaha / dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat (4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. (5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan (6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (7)

Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (Ninik, 2011)

Peran komite sekolah yang sangat vital dalam pengembangan kualitas pendidikan menuntut sumbangsih komite sekolah sebagai penasehat, pendukung, pengontrol, dan mediator untuk penggalangan dana. Peran tersebut perlu didukung dengan keikutsertaan komite sekolah dalam mengembangkan aktivitas dan produktivitas perekonomian koperasi, artinya komite sekolah sebagai penggerak ekonomi, dan pelopor dunia wirausaha dalam rangka kemajuan siswa/i dalam proses pembelajaran.

Pemberdayaan dan peningkatan fungsi komite sekolah, dapat dilakukan dengan cara membina kerja sama dengan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara komite sekolah dengan sekolah diharapkan dapat melahirkan tanggung jawab bersama antara masyarakat (wali murid) dan sekolah sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Peran komite sekolah sebagai mediator untuk melatih keterampilan dan kewirausahaan siswa dapat diwujudkan dengan membentuk koperasi sebagai salah satu wadah untuk melatih siswa berwirausaha. Disamping itu pula, dampak positif dari pembentukan koperasi yang diinisiasi oleh komite sekolah ini dapat membantu wali murid yang memiliki keterbatasan dalam hal pendapatan. Nantinya, pendapatan dari koperasi yang dibentuk tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti buku, seragam dan penunjang lainnya dalam proses pembelajaran.

## **1.2. Tujuan Khusus**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan model perekonomian koperasi sekolah menengah pertama melalui peningkatan peran komite sekolah dalam program bina lingkungan.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan peran komite sekolah dalam membentuk perekonomian koperasi sekolah menengah pertama, yang mencakup: menyediakan buku media belajar, mendukung, mengontrol, dan mengevaluasi. Kondisi akan dijadikan bahan untuk mengembangkan Model Perekonomian Koperasi Sekolah Menengah Pertama melalui

Peningkatan Peran Komite Sekolah dalam Program Bina Lingkungan di Kota Bandarlampung.

- b. Mengimplementasikan Model Perekonomian Koperasi Sekolah Menengah Pertama melalui Peningkatan Peran Komite Sekolah dalam Program Bina Lingkungan di Kota Bandarlampung, yang akan berdampak pada kualitas siswa/i dan sekolah secara keseluruhan.

### **1.3. Urgensi dan Luaran Penelitian**

Secara khusus untuk komite sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan MBS. Dalam MBS, sekolah mempunyai wewenang untuk mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan ini dijalankan dengan asas transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Artinya dalam pengelolaan sekolah, dewan pendidik, khususnya kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu wadah yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk mengemban amanat tersebut. Wadah tersebut adalah komite sekolah.

Dapat dilaksanakannya peran dan fungsi komite sekolah, maka akan menempatkan komite sekolah pada posisi yang sangat strategis untuk mamajukan dan meningkatkan mutu pendidikan. Strategi peningkatan mutu pendidikan melalui komite sekolah ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat (wali murid) itu sendiri. Artinya dengan mengoptimalkan peran komite sekolah maka akan meberikan jaminan pelibatan masyarakat (wali murid) dalam mendukung proses pendidikan.

Dilaksanakannya peran dan fungsi komite sekolah sebagai pelaku ekonomi dalam peningkatan mutu pendidikan, maka hal itu dapat dikatakan terselenggaranya model perekonomian koperasi sekolah. Komite sekolah sebagai salah satu komponen saat ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab dan aturan yang berlaku. Hal ini yang dikatakan tata kelola yang baik dan bersih dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik disekolah.

Pada dasarnya, penyelenggaraan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip kemandirian merupakan tujuan bagi setiap sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena dengan terciptanya kemandirian sekolah maka semua

komponen pendidikan akan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dengan baik dan bersih secara profesional dan proposional.

Kondisi yang diharapkan ini, tidak semua terlaksana. Karena ada banyak variabel yang memberikan kontribusi untuk mencapai kemandirian sekolah,, diantaranya adalah semua komponen pendidikan di sekolah harus memahami tugas dan fungsinya masing-masing, kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, manajemen sekolah, dan dukungan nyata dari masyarakat.

## **BAB II. STUDI PUSTAKA**

### **2.1 Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 17 ayat (1) pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah; (2) pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (mts), atau bentuk lain yang sederajat.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD) atau yang sederajat. Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Siswa kelas 9 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional yang mempengaruhi kelulusan atau tidaknya siswa. Lulusan sekolah menengah pertama dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi, yaitu pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) atau yang sederajat. Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) termasuk wajib belajar bagi setiap warga negara berusia 7-15 tahun di Indonesia. Wajib belajar 9 tahun meliputi pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pengelolaan sekolah menengah pertama negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah menengah pertama negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada tahun ajaran 1994/1995 hingga



2003/2004, sekolah ini pernah disebut sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

Merujuk pada pemikiran Edward Sallis, Sudarwan Danim (2006) mengidentifikasi ciri-ciri sekolah bermutu, yaitu:

1. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.
2. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dengan komitmen untuk bekerja secara benar dari awal.
3. Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya, sehingga terhindar dari berbagai “kerusakan psikologis” yang sangat sulit memperbaikinya.
4. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif.
5. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada masa berikutnya.
6. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
7. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.
8. Sekolah mendorong orang dipandang memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.
9. Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horozontal.
10. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.
11. Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.
12. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja.

13. Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus sebagai suatu keharusan.

## 2.2 Perekonomian Koperasi

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa bangunan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama di antara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang kaya melainkan juga milik oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 18).

Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Dalam BAB II Pasal 3 Undang – undang RI No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945”. Menurut Bang Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Selanjutnya fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### **2.2.1 Fungsi Koperasi Sekolah**

1. Menunjang program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian melalui program pendidikan sekolah.
2. Menumbuhkan kesadaran berkoperasi di kalangan siswa.
3. Membina rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa koperasi.
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi, agar kelak berguna di masyarakat.
5. Membantu kebutuhan siswa serta mengembangkan kesejahteraan siswa di dalam dan luar sekolah.

### **2.2.2 Tujuan Koperasi Sekolah**

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan sosial. Fungsi ekonomi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dengan berprinsip ekonomi, fungsi sosial dengan akan terjadi proses tolong menolong dan gotong royong antar sesama anggota koperasi. Melalui pembelajaran koperasi di sekolah siswa akan terbentuk pola sikap dan karakter untuk selalu menggunakan koperasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial

Sedangkan pembentukan Koperasi Sekolah dikalangan siswa dilaksanakan dalam rangka menunjang pendidikan siswa dan latihan koperasi. Dengan demikian, tujuan pembentukannya tidak terlepas dari

tujuan pendidikan dan program pemerintah dalam menanamkan kesadaran berkoperasi sejak dini.

### 2.3 Peran Komite Sekolah

Keberadaan komite sekolah secara legal formal dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Berdasarkan Mendiknas tersebut, komite sekolah bertujuan untuk (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) Menciptakan suasana kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Dengan demikian, maka komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

Lebih lanjut dalam Keputusan Mendiknas tersebut dijelaskan bahwa, keberadaan komite sekolah berperan sebagai (1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud *financial*, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan (4) *Mediator* antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Terkait dengan keempat peran komite sekolah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Peran memberi pertimbangan, dilakukan komite sekolah pada aspek perencanaan sekolah Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pelaksanaan program sekolah, dan pengelolaan sumberdaya pendidikan.

- (2) Peran memberi dukungan, dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya, pengelolaan sarana dan prasarana, dan pengelolaan anggaran.
- (3) Peran mengontrol, dilaksanakan dalam mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, memantau pelaksanaan program sekolah, dan memantau *output* (keluaran) pendidikan.
- (4) Peran penghubungan, menjadi penghubung sekolah dengan masyarakat, dinas pendidikan, dan dunia usaha dalam hal perencanaan, pelaksanaan, program, dan pengelolaan sumberdaya.

Mengingat begitu pentingnya peran dan fungsi komite sekolah tersebut maka dalam pembentukan organisasi komite sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. *Transparan* artinya komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas, mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara *akuntabel* maksudnya panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara *demokratis* artinya dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu, pemilihan anggota komite dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Komite sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memegang prinsip partisipasi dalam kegotong-royongan, transparansi yang artinya memberikan kejelasan terhadap program yang dijalankan, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip tersebut merupakan bagian dari prinsip perekonomian koperasi yang mengedepankan pada prinsip kegotong-royongan yang dalam proses pelaksanaannya merupakan bertolak pada prinsip kemandirian, keluwesan, dan fleksibilitas melalui komunitas pendidikan di sekolah.

Berdasarkan pemahaman di atas maka peran komite sekolah dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1.  
Indikator Kegiatan Operasional Komite Sekolah

No	Peran Komite Sekolah	Fungsi Manajemen Pendidikan
1	Badan Pertimbangan ( <i>Advisory Agency</i> )	1. Perencanaan Sekolah (RKS, RKT, dan RKAS)
		2. Pelaksanaan Program: a. Kurikulum b. PBM c. Penilaian
		3. Pengelolaan sumberdaya Pendidikan: a. SDM b. Sarana dan Prasarana c. Anggaran
2	Badan Pendukung ( <i>Supporting Agency</i> )	1. Pengelolaan Sumber daya
		2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
		3. Pengelolaan Anggaran
3	Badan Pengontrol ( <i>Controlling Agency</i> )	1. Mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah
		2. Memantau pelaksanaan program sekolah
		3. Memantau output pendidikan
4	Badan Penghubungan ( <i>Mediator Agency</i> )	1. Perencanaan
		2. Pelaksanaan program
		3. Pengelolaan sumber daya pendidikan

### BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.

Menurut Sujadi (2003: 164), Penelitian dan Pengembangan atau *Research and Development* (R&D) adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras (*hardware*), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak (*software*), seperti program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain-lain.

Menurut Sugiyono (2011: 407) metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.

#### Langkah-langkah Penelitian Pengembangan

Menurut Sugiyono (2011: 408) langkah-langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk menghasilkan produk tertentu dan untuk menguji keefektifan produk yang dimaksud, adalah :

1. Potensi dan masalah
2. Mengumpulkan Informasi dan Studi Literatur
3. Desain Produk
4. Validasi Desain
5. Perbaiki Desain
6. Uji coba Produk
7. Revisi Produk

8. Ujicoba Pemakaian
9. Revisi Produk
10. Pembuatan Produk Masal

Berdasarkan tahapan di atas, penelitian ini terdiri atas dua tahap yang dirangkai dalam dua tahun untuk anggaran 2014 dan 2015. Penelitian tahun pertama merupakan penelitian lapangan yang akan dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Penelitian ini akan menelusuri pelaksanaan peran komite sekolah dalam penerapan ekonomi koperasi SMP. Adapun susunan rancangan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### **3.1 Aktivitas Penelitian Tahun Pertama**

#### **1. Penentuan lokasi penelitian**

Tahap pertama yang dilakukan pada penelitian tahun pertama adalah menentukan lokasi penelitian. Dalam menentukan lokasi penelitian harus memiliki karakteristik sekolah yang diinginkan, yaitu Sekolah Menengah Pertama yang memiliki komitmen untuk menerapkan sistem perekonomian koperasi di sekolahnya. Pemilihan lokasi tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Bandar Lampung.

#### **2. Pengumpulan Data**

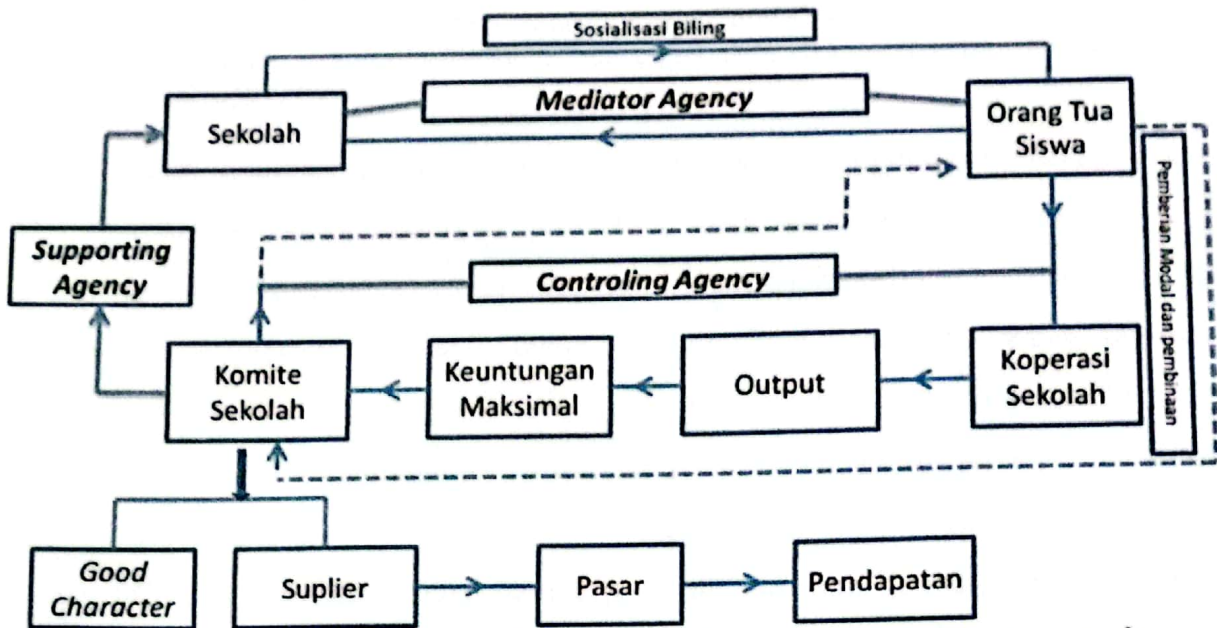
Pada tahap kedua yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian dari sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan pada awal penelitian sampai padatahap penyusunan laporan penelitian.

#### **3. Rancangan model**

Setelah mendapatkan masukan berbagai pihak, maka akan dirumuskan rancangan model perekonomian koperasi di sekolah melalui peran komite sekolah. Pada tahap ini merupakan rancangan awal yang masih



diperlukan verifikasi lebih lanjut. Adapun gambaran dari model tersebut adalah sebagai berikut.



**Gambar 1. Kerangka Pikir Pengembangan Model Perekonomian Koperasi Sekolah SMP melalui Peningkatan Peran Komite Sekolah**

Berdasarkan gambar di atas mengenai Pengembangan model perekonomian koperasi melalui peningkatan peran komite bermula dari komite sekolah yang merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatukan pendidikan. Komite sekolah melalui perannya sebagai Badan Pendukung atau *Supporting Agency* dilaksanakan dalam pengelola sumberdaya, pengelola sarana dan prasarana, dan pengelola anggaran, yang kemudian dilanjutkan dari sekolah kepada orang tua siswa. Peran komite sekolah yang berfungsi yaitu Badan Perhubungan atau *Mediator Agency* dimana komite sekolah menjadi penghubung sekolah dengan masyarakat, dinas pendidikan, dan dunia usaha dalam hal ini perencanaan, pelaksanaan, program, dan pengelola sumberdaya. Selanjutnya dari orang tua siswa diberikan pembinaan, pembekalan, dan pelatihan serta memberikan modal untuk mempersiapkan dan menghasilkan jiwa *enterprenuer* yang kemudian dikemas dan diberikan suatu wadah dari komite sekolah berupa perencanaan pembentukan koperasi sekolah.

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO dalam Revrisond Baswir, 2000: 2).

Dari koperasi sekolah yang dibentuk akan menghasilkan output yang mendapatkan keuntungan maksimal yang nantinya akan kembali lagi kepada orang tua siswa tersebut untuk memenuhi kebutuhan anaknya agar dapat terpenuhi seperti buku, seragam sekolah, dan yang lainnya. Pelaksanaan koperasi sekolah yang dibentuk oleh komite sekolah akan dikontrol sebagaimana peran komite yaitu Badan Pengontrol (*Controlling Agency*), dilaksanakan dalam mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, memantau pelaksanaan program sekolah, dan memantau *output*. Sehingga pengembangan model perekonomian koperasi melalui peningkatan peran komite sekolah ini diharapkan dapat menciptakan peserta didik yang memiliki *Good Character* dan untuk koperasi sekolah yang telah dibentuk menjadi supplier yang diminta pasar kemudian menghasilkan pendapatan.

#### 4. Studi Banding

Untuk memverifikasi hasil rancangan awal, maka peneliti bersama timpeneliti lainnya melakukan studi banding ke berbagai sekolah di daerah lain. Penentuan lokasi banding ini, dinilai bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan penerapan perekonomian koperasi di sekolah.

#### 5. Revisi Rancangan Model

Setelah melalui tahap sebelumnya, dokumen rancangan model awal yang telah dirumuskan sebelumnya dinilai cukup alasan untuk direvisi sehingga akan layak untuk diimplementasikan.

#### 6. Produk Tahun Pertama

Produk tahun pertama adalah dokumen model perekonomian koperasi SMP melauai peningkatan peran komite sekolah dalam program bina

lingkungan. Model ini diujicobakan di sekolah lain dengan karakteristik sekolah yang sama dan berbeda pada tahun kedua kegiatan penelitian.

### **3.2 Aktivitas Penelitian Tahun Kedua**

Subjudul dua : Implementasi Model Perekonomian Koperasi Sekolah Menengah Pertama melalui peningkatan peran komite sekolah dalam program bina lingkungan.

Tujuan : Untuk Mengetahui tingkat keberhasilan implementasi Model Perekonomian Koperasi Sekolah Menengah Pertama melalui peningkatan Peran Komite Sekolah dalam Program Bina Lingkungan

Adapun aktivitas tersebut mencakup:

#### **1. Seminar dan Sosialisasi model**

Kegiatan ini diikuti oleh para praktisi pendidikan terutama para kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan model perekonomian koperasi sekolah menengah pertama melalui peningkatan peran komite sekolah yang telah disusun pada kegiatan penelitian tahun pertama.

#### **2. Uji Coba Model**

Pada tahap ini akan diujicobakan pada sekolah yang telah ditentukan sebagai langkah awal implementasi model perekonomian koperasi sekolah menengah pertama melalui peningkatan peran komite sekolah. Hasil uji coba selanjutnya akan dilakukan revisi oleh ahli melalui *Forum Group Discussion* (FGD).

### 3. Validasi dan Revisi Model

Validasi dan revisi model, merupakan tahap dalam pemodelan untuk menentukan tingkat kesesuaian model dengan sistem nyata yang direpresentasikan. Terdapat empat tahap dalam proses validasi model, yaitu: (1) Validasi konseptual, (2) validasi logikal, (3) validasi eksperimental, dan (4) validasi operasional (Landry et al., 1983).

### 4. Implementasi Model

Langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi model yang telah direvisi pada sekolah yang telah ditentukan sebagai lokasi penelitian lainnya yaitu di daerah yang berada perkotaan (urban), yakni Kota Bandar Lampung dan di daerah pedesaan (sub urban), yakni Kabupaten Way Kanan.

### 5. Pengolahan Data Hasil Implementasi Model

Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui hasil implementasi model di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif yang merujuk pada data historis, dilanjutkan dengan uji verifikasi dan validasi.

### 6. Laporan Hasil Penelitian dan Publikasi

Hasil pengolahan data dijadikan dasar untuk penyusunan laporan penelitian, selanjutnya diseminarkan dan dipublikasikan dalam terbitan jurnal penelitian.

### 7. Selesai seluruh aktivitas penelitian

## BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada tahun pertama yaitu (a) identifikasi keberadaan koperasi di seluruh sekolah menengah pertama yang terdapat di kota Bandar Lampung (b) wawancara kepada perangkat sekolah terhadap upaya pengembangan koperasi sekolah berikut dengan keterlibatan komite sekolah. Perlunya melakukan identifikasi koperasi sekolah adalah untuk mengklasifikasikan sekolah dengan koperasi sekolah yang mapan, berkembang, dan belum terbentuk. Selanjutnya dari data yang diperoleh akan diterapkan langkah-langkah strategis yang berbeda untuk menyelesaikan masalah pengembangan koperasi sekolah melalui optimalisasi peran komite sekolah. Adapun sebaran sekolah yang sudah memiliki koperasi dan yang belum memiliki koperasi disajikan pada data tabel 4.1

#### Daftar Nama SMP di Bandar Lampung Yang memiliki Koperasi dan Tidak

No.	Nama	Alamat	Status	Koperasi	
				Ya	Tidak
1	MTSN 1 TANJUNG KARANG	Jl. Way kanan no. 42	Negeri	Ya	
2	MTSN 2 TANJUNG KARANG	Jl. Pulau pisang no. 20	Negeri	Tidak	
3	SMPN 1 BANDAR LAMPUNG	Jl. mr. gele harun no.30	Negeri	Ya	
4	SMPN 2 BANDAR LAMPUNG	Jl. Jend. Sudirman rawa laut	Negeri	Ya	
5	SMPN 3 BANDAR LAMPUNG	Jl. Basuki rahmat gedong pakuon	Negeri	Ya	
6	SMPN 4 BANDAR LAMPUNG	Jl. Hos. Cokroaminoto no. 93	Negeri	Ya	
7	SMPN 05 BANDAR LAMPUNG	Jl. Beo no. 134 tanjung agung	Negeri	Ya	
8	SMPN 06 BANDAR LAMPUNG	Jl. Laksamana malahayati	Negeri	Ya	
9	SMPN 07 BANDAR LAMPUNG	Jl. Sultan badaruddin n0.4 sg. Mider	Negeri	Ya	

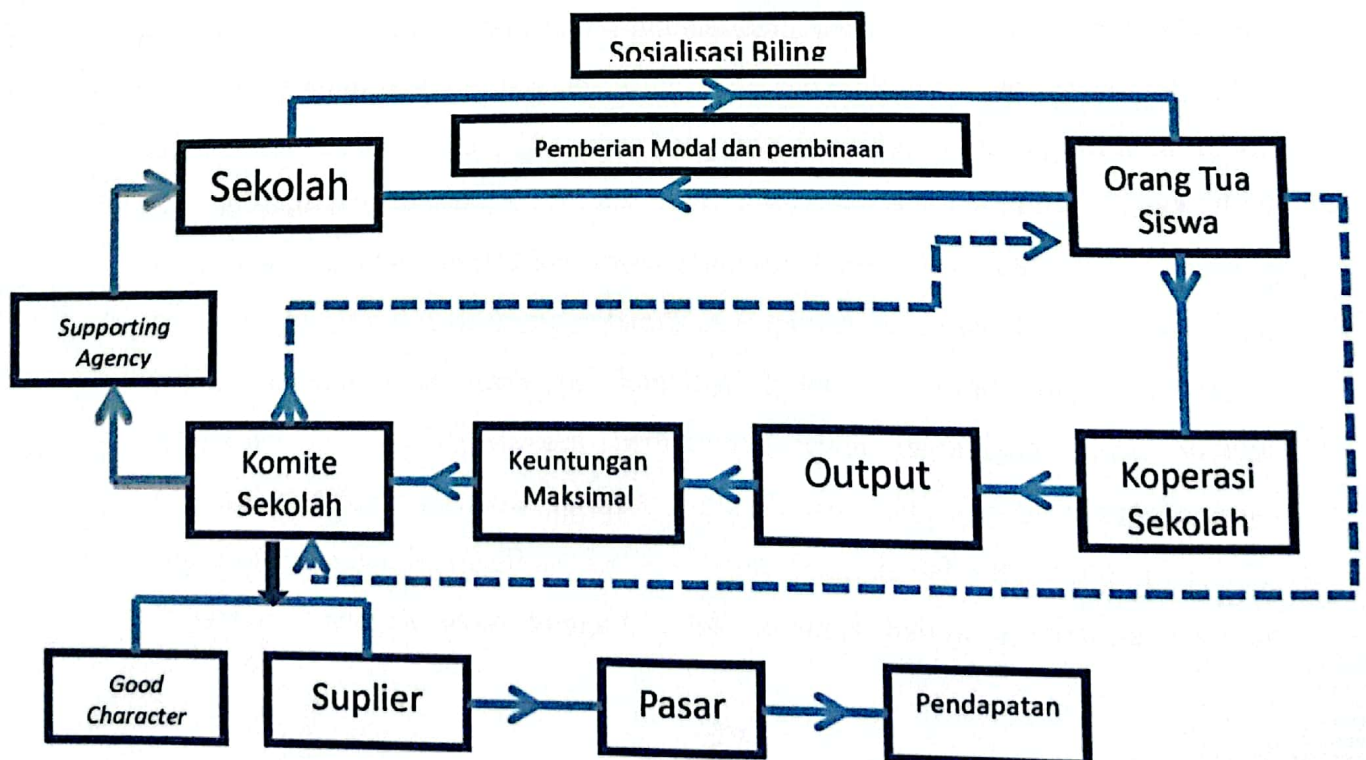
10	SMPN 08 BANDAR LAMPUNG	Jl. Untung suropati gg. Bumi manti 2	Negeri	Ya
11	SMPN 09 BANDAR LAMPUNG	Jl. Amir hamzah no. 9 gotongroyong	Negeri	Ya
12	SMPN 10 BANDAR LAMPUNG	Jl. Panglima polim no. 5	Negeri	Ya
13	SMPN 11 BANDAR LAMPUNG	Jl. Sentot ketapang	Negeri	Ya
14	SMPN 12 BANDAR LAMPUNG	Jl. P. Morotai	Negeri	Ya
15	SMPN 13 BANDAR LAMPUNG	Jl. Marga beringin raya	Negeri	Ya
16	SMPN 14 BANDAR LAMPUNG	Jl. Teuku cik ditiro langkapura	Negeri	Ya
17	SMPN 15 BANDAR LAMPUNG	Jl. Banten no. 18 kuripan	Negeri	Ya
18	SMPN 16 BANDAR LAMPUNG	Jl. Dr. Cipto mangunkusumo no. 42	Negeri	Tidak
19	SMPN 17 BANDAR LAMPUNG	Jl. Abdi negara no. 9	Negeri	Ya
20	SMPN 18 BANDAR LAMPUNG	Jl. Rasuna said no. 29 sumur batu	Negeri	Ya
21	SMPN 19 BANDAR LAMPUNG	Jl. Sukarno hatta gg. Turi no. 1	Negeri	Ya
22	SMPN 20 BANDAR LAMPUNG	Jl. Ra. Basit labuhan dalam	Negeri	Ya
23	SMPN 21 BANDAR LAMPUNG	Perum korpri bnlok d8	Negeri	Ya
24	SMPN 22 BANDAR LAMPUNG	Jl. Pagar alam gedong meneng	Negeri	Tidak
25	SMPN 23 BANDAR LAMPUNG	Jl. Jend. Sudirman no. 76 rawa laut	Negeri	Ya
26	SMPN 24 BANDAR LAMPUNG	Jl. Letkol hi. Indro suratman	Negeri	Ya
27	SMPN 25 BANDAR LAMPUNG	Jl. Amir hamzah no. 58 gotongroyong	Negeri	Ya
28	SMPN 26 BANDAR LAMPUNG	Jl. Imam bonjol kurungan nyawa	Negeri	Ya
29	SMPN 27 BANDAR LAMPUNG	Lempasing	Negeri	Ya
30	SMPN 28 BANDAR LAMPUNG	Perumnas bukit kemiling	Negeri	Ya
31	SMPN 29 BANDAR LAMPUNG	Jl. Sukarno hatta	Negeri	Tidak
32	SMPN 30 BANDAR LAMPUNG	Serengsem	Negeri	Tidak

33	SMPN 31 BANDAR LAMPUNG	Jl. Riyakudu campang raya tanj. Krg timur	Negeri	Ya
34	SMPN TERBUKA 11 BANDAR LAMPUNG	Jl. Sentot, ketapang telukbetung selatan	Negeri	Ya
35	SMPN TERBUKA 15 BANDAR LAMPUNG	Jl. Banten no.18 telukbetung barat	Negeri	Ya
36	SMPN TERBUKA 20 BANDAR LAMPUNG	Jl. R.a Basyid	Negeri	Ya

#### 4.2 Pembahasan

Hasil analisis terhadap 36 sekolah menengah pertama yang terdapat di kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa terdapat 5 sekolah (13,88%) yang belum memiliki koperasi sedangkan sisanya (31 sekolah atau 86,11%) sudah memiliki koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar SMP di kota Bandar Lampung sudah memperhatikan pentingnya keberadaan koperasi di sekolah. Pengembangan model perekonomian koperasi sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui peningkatan peran komite sekolah ini dikembangkan dengan model sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 4.1 berikut.

Gambar.4.1 Model Prototipe Pengembangan Koperasi Sekolah



Koperasi saat ini masih perlu dikembangkan agar dapat bersaing dengan perkembangan usaha swasta lainnya dan ini merupakan pendidikan kewirusahaan yang ideal di sekolah. Masalah-masalah yang dihadapi koperasi terutama aspek keseimbangan, aspek usaha dan modal, modal kerja bagi koperasi sangat penting perlu mendapat perhatian penting dari seluruh *stakeholders*. Kendala klasiknya adalah pada ketersediaan modal. Namun demikian, modal tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dan operasional koperasi apabila terjadi kekurangan modal kerja akan mengakibatkan koperasi tersebut mengalami stagnansi perkembangan, masalah modal ini sangat penting bagi koperasi karena dari itu koperasi sekolah harus cermat dalam mengelola modal.

Masalah koperasi sekolah yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan dan perkembangannya menyebabkan koperasi sebagai badan usaha yang berada di sekolah harus memiliki budaya korporasi yang kondusif sehingga dapat mengatualisasikan dirinya ditengah realitas liberalisasi perekonomian yang terus bergerak sehingga koperasi sekolah akan mempunyai daya tarik sebagai sarana penghimpun potensi ekonomi para anggotanya yang kecil-kecil dan tersebar di lingkup sekolah karena koperasi lebih di promosikan sebagai badan usaha yang ideal (tidak mencari keuntungan dan berwatak sosial).

Perkembangan teknologi yang bisa mengembangkan koperasi sekolah tersebut perlu diadopsi dalam mendata semua unit barang dan harga barang ke dalam komputer agar sewaktu-waktu dapat diperiksa apabila ada kesalahan dalam pencatatan unit barang yang telah dikeluarkan. Siswa juga dapat menyebabkan kendala tersebut datang, karena kalau kita mengikutsertakan siswa sebagai anggota atau nasabah dalam koperasi yang ada disekolah ini mungkin akan lebih baik berkembangnya koperasi ini dan akan lebih maju, karena jumlah siswa lebih banyak dibandingkan jumlah karyawan atau guru-guru di sekolah tersebut.

Pemerintah perlu mengembangkan koperasi sehingga hal tersebut akan menjadi alasan kuat mengapa koperasi Indonesia untuk maju. Koperasi sebenarnya telah dibantu oleh pemerintah lewat dana-dana segar, namun pengawasan terhadap bantuan tersebut perlu ditingkatkan. Karena sifat bantuannya yang tidak wajib dikembalikan, hal ini dapat menjadi hal yang tidak mendidik. Akibatnya, koperasi akan menjadi tidak mandiri hanya menunggu bantuan



selanjutnya dari pemerintah. Selain merugikan pemerintah bantuan seperti ini pula akan menjadikan koperasi tidak bisa bersaing karena terus terusan menjadi benalu negara.

Perkembangan koperasi di Indonesia yang dilakukan dari atas (bottom up) tetapi dari atas (top down), artinya koperasi berkembang di Indonesia bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. Koperasi seyogyanya terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan yang merupakan tujuan koperasi itu sendiri, sehingga pemerintah tinggal menjadi pendukung yang konstruktif saja. Di Indonesia, pemerintah bekerja double selain mendukung juga harus mensosialisakannya dulu ke bawah sehingga rakyat menjadi mengerti akan manfaat dan tujuan dari koperasi.

Koperasi sekolah sebagai wadah pendidikan perkoperasian dan sekaligus sebagai kegiatan ekonomi dari, oleh, dan untuk siswa, maka keberadaannya perlu dikembangkan. Untuk itu perlu peranan dari beberapa pihak seperti kepala sekolah, komite sekolah orang tua atau masyarakat perlu diwadahi. Kepala sekolah dapat berperan dalam menciptakan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi sekolah, memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi sekolah, serta bertanggung jawab atas kelancaran jalannya koperasi sekolah.

Pada level pemerintah, upaya pembinaan koperasi sekolah, dapat dilakukan dengan menetapkan kebijaksanaan dalam memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan, dan pemberian fasilitas terhadap koperasi sekolah, memberikan kemudahan dalam pengadaan alat-alat sekolah dan fasilitas lainnya, serta memberikan kemudahan dan membantu dalam masalah permodalan. Seorang guru pun dapat berperan dalam pengembangan koperasi sekolah seperti mengarahkan kegiatan koperasi sekolah sesuai dengan tujuannya, memberikan langkah-langkah praktis dalam menjalankan koperasi sekolah, memberikan saran-saran praktis, nasihat, dan bantuan konsultasi atas masalah-masalah yang dihadapi koperasi sekolah, serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan usaha koperasi sekolah.

Beberapa hal dapat dilakukan untuk mengembangkan koperasi sekolah. Dari sisi kelembagaan, diperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi (mapping) terhadap koperasi sekolah yang ada untuk menetapkan program kebijaksanaan teknis selanjutnya. Dalam konteks otonomi daerah, pejabat terkait perlu memberikan kewenangan yang proporsional dalam menetapkan koperasi sekolah sebagai sebuah badan hukum dalam satu atap sesuai dengan kompetensi masing-masing (sesuai wilayah kerjanya). Dari sisi produktivitas dan efisiensi, upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi koperasi sekolah perlu bekerjasama dengan koperasi lain pada sektor-sektor produksi dan distribusi. Jika kondisi normal, maka koperasi sekolah dapat diberikan peran lebih besar pada sektor jasa dan perdagangan sesuai dengan mekanisme pasar. Untuk meningkatkan peranan tersebut, pemerintah maupun dunia usaha dapat memberikan fasilitas baik dalam pengembangan, sarana/ prasarana dan kemitraan kepada koperasi sekolah.

## **Bentuk Keterlibatan Komite Sekolah dalam Pengembangan Koperasi Sekolah**

### ***Instrumen yang Digunakan***

#### **➤ Badan Pendukung (Supplaining Agency)**

##### **A. Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

1. Apakah Komite Sekolah sekolah perlu mendukung adanya pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi setiap anggota komite dan siswa, Jelaskan alasannya?
2. Bagaimana peran komite sekolah dalam meningkatkan partisipasi anggota koperasi?
3. Apakah sistem balas jasa (SHU) koperasi sekolah sudah sesuai dengan jati diri koperasi?
4. Bagaimana sistem balas jasa Sisa Hasil Usaha (SHU) yang sesuai dengan kontribusi setiap anggota komite dalam koperasi?
5. Apakah kinerja komite sekolah sudah baik dalam mendukung program pendidikan disekolah?
6. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara komite sekolah dengan pihak sekolah?

## B. Pengelolaan Sarana Prasarana

7. Bagaimana kelengkapan peralatan kerja yang mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan khususnya koperasi disekolah?
8. Apakah sarana kerja mendukung pelayanan yang diterima dalam kegiatan pendidikan disekolah?
9. Apakah sistem administrasi dan pengadaan sarana dan prasana sekolah sudah tergolong baik, jelaskan alasan anda?
10. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana koperasi disekolah?
11. Apa harapan anda sebagai anggota komite sekolah dalam pengelolaan koperasi sekolah?
12. Apakah program usaha koperasi sekolah sekarang sudah berjalan dengan baik dan apa saja jenis usaha yang sudah berjalan?

## C. Pengelolaan Anggaran

13. Apakah komite sekolah mengetahui sumber anggaran dalam menjalankan koperasi sekolah?
14. Bagaimana mekanisme pelaporan keuangan (transparansi) yang diberikan pihak sekolah dalam mengelola koperasi sekolah?
15. Apakah perlu adanya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) dalam setiap satu periode ( satu tahun) kepengurusan?
16. Apakah perlu pembuatan laporan keuangan sesuai standart keuangan koperasi di indonesia, apabila perlu jelaskan alesanya?
17. Apakah perlu adanya Staff atau Bendara Keuangan yang memiliki keahlian dalam penyusunan laporan keuangan, Apabila perlu, jelaskan alasanya?

### ➤ **Badan Pengontrol**

#### A. Mengontrol perencanaan pendidikan sekolah

18. Bagaimana peran komite sekolah dalam mengontrol sistem perencanaan pendidikan jangka panjang?
19. Apakah fokus pendidikan sekolah hanya berbasis pada pengetahuan siswa, tanpa disesuaikan dengan keterampilan kerja atau organisasi?
20. Apakah standar pendidik (guru) yang diterima disekolah sudah sesuai dengan kebutuhan proses belajar mengajar disekolah?
21. Apa harapan anda sebagai anggota komite sekolah dalam fokus kopetensi standart lulusan yang dicapai?
22. Apakah perlu pendidikan koperasi dan organisasi dalam mendukung kopetensi lulusan siswa, Jelaskan alasanya?

**B. Memantau pelaksanaan program**

23. Apakah program pelaksanaan koperasi sekolah sudah sejalan dengan jati diri koperasi indonesia, Jelaskan alasannya?
24. Bagaiman proses pendidikan dan pelatihan keorganisasian khususnya koperasi dalam kaitanya dengan proses belajar mengajar disekolah?
25. Apakah media yang tersedia sudah dapat memenuhi standart pembelajaran keorganisasian koperasi?
26. Bagaimana sistem tata kelola usaha yang berjalan disekolah anda?
27. Apakah sistem pengelolaan usaha sudah berjalan dengan baik dan dapat terus dikembangkan?
28. Apakah ada program penjenjangan pendidikan dan pelatihan koperasi mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan lanjut?
29. Apakah disekolah selalu berusaha mengadakan kunjungan koperasi atau usaha dalam rangka pengembangan koperasi sekolah?
30. Bagaimana peran sekolah dalam memfasilitasi kegiatan studi lapangan usaha untuk pengembangan koperasi?

**C. Memantau output lulusan pendidikan**

31. Apakah lulusan program pembinaan koperasi sekolah perlu memahami sistem ekonomi koperasi dan budaya organisasi?
32. Bagaimanakah kontribusi lulusan program pembinaan koperasi sekolah dalam dunia kerja?
33. Apakah lulusan program pembinaan koperasi sekolah memahami pengelolaan dan manajemen koperasi?
34. Bagaiman peran program lulusan pembinaan koperasi sekolah dalam mensosialisasikan ekonomi koperasi yang berkelanjutan di masyarakat?
35. Apakah koneksi atau jaringan kerjasama lulusan program koperasi sekolah terjalin secara luas dan berkelanjutan?

➤ **Badan Penghubung**

**A. Perencanaan**

36. Bagaimana peran komite yang baik dalam program pembinaan koperasi bersama dinas koperasi?
37. Apakah komite sekolah dapat berperan sebagai lembaga penghubung kerjasama program pendidikan koperasi sekolah?
38. Bagaimanakah wujud pendidikan dan pelatihan koperasi yang diharapkan oleh komite sekolah?
39. Bagaimana kerjasama yang telah atau akan dijalin dalam pengembangan usaha koperasi dengan dunia usaha?

40. Apakah koperasi sekolah dapat bekerjasama dengan penyedia modal (perbankan) sebagai investor dalam pengembangan usaha?

**B. Pelaksanaan Program**

41. Bagaimana peran komite dalam sosialisasi program pendidikan koperasi disekolah?

42. Apakah Program koperasi sekolah dapat terus dikembangkan dengan memperdayakan peran komite sekolah?

43. Bagaimana program koperasi sekolah dapat berkontribusi dalam peningkatan kopetensi lulusan?

**C. Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

44. Bagaimana kontribusi sekolah dalam meningkatkan pendidikan dan pelatihan koperasi untuk anggota komite?

45. Apakah komite sekolah dapat berperan dalam pengembangan koperasi dengan bekerjasama kepada pihak eksternal (luar) sekolah?

46. Apakah dengan pemberdayaan koperasi sekolah melalui komite dapat merubah sudut pandang masyarakat dalam berkoperasi?

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam mengembangkan koperasi sekolah, perlu dibangun sebuah sistem atau model pengembangan koperasi sekolah yang holistik dengan sistem pengawasannya yang sistematis dan membuka diri terhadap keterlibatan berbagai pihak. Dengan demikian akan membantu koperasi menjadi lebih profesional, mandiri dan mampu bersaing. Koperasi sekolah dapat lebih berkembang dan lebih profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Koperasi sekolah perlu lebih berinisiatif dan kreatif untuk memajukan koperasi Indonesia khususnya dalam lingkup sekolah. Sekolah, pemerintah, bersama dengan komite sekolah dan para pemangku kepentingan dapat lebih berinisiatif dan mendukung koperasi sekolah untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan koperasi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*.  
Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Anonim, Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pendoman Teknis Kepala Sekolah, Penguatan Komite Sekolah/Madrasah untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik*. Jakarta: Kemendiknas dan Kemenag, 2009.
- Arifin Sitio dan Tamba Halomoan. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Baswir, Revrison, 2000, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Erani Yustika. Ahmad, *Ekonomi Kelembagaan*, 2006, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kuncoro. Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, 2003, Kaliurang: Erlangga.
- Lipsey. Richard G, *Pengantar Makro Ekonomi*, 1995, Jakarta : Binarupa Aksara.
- Samuelson. Paul, *Makroekonomi*, 1992, Jakarta : Erlangga.

# OPTIMALISASI KOMITE SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI SEKOLAH DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

*Rufaida, E., Zakaria, W.A., dan Yonrizal*

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

E-mail: atin\_lin@yahoo.com

**Abstrak:** Komite sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran strategis untuk mengembangkan komponen sekolah secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah dalam mengembangkan koperasi sekolah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah, usaha-usaha komite sekolah di SMP di Kota Bandar Lampung serta mengembangkan model kemitraan koperasi sekolah dan komite sekolah. Fokus penelitian penelitian ini adalah peran komite sekolah dalam mengembangkan kewirausahaan melalui koperasi sekolah serta upaya komite sekolah dalam membangun koperasi sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan rancangan riset pengembangan model. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, studi dokumentasi dan pengembangan model. Teknik untuk keabsahan data menggunakan triangulasi data. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite sekolah dapat berperan dalam pengembangan kewirausahaan pada kepala sekolah, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat dengan melibatkan kepala sekolah, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat agar mengetahui potensi mereka.

**Kata kunci :** komite sekolah, koperasi sekolah, kewirausahaan

## PENDAHULUAN

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi banyak faktor yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Di antara faktor tersebut adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Mulai bantuan pemikiran, sarana dan prasarana, pembiayaan serta aspek lain. Selain itu, kinerja kepala sekolah juga menjadi kuncikeberhasilan pendidikan. Kedua unsur ini perlu melakukan kerjasama kolaboratif dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara yuridis, tuntutan keterlibatan masyarakat itu ditetapkan dalam Kepmendiknas nomor 44 tahun 2002 tentang Komite Sekolah sebagai lembaga resmi yang menjadi mitra sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan komite sekolah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik



pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran salah satu peran komite sekolah dalam mewujudkan koperasi sekolah di sekolah yaitu sebagai badan pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan/sekolah. Oleh karena itu bagaimana strategi mengelola lembaga sekolah dengan menggunakan konsep koperasi sekolah yang menguntungkan bagi sekolah dan siswa, dengan cara lebih mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya.

Peranan komite sekolah dalam mengembangkan koperasi (kewirausahaan) juga merupakan bagian dari konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang akan memberikan jaminan pelibatan *stakeholders* pendidikan dalam mendukung proses pendidikan secara lebih luas. MBS merupakan pola manajemen baru yang bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah (pengelola sekolah) untuk mengelola sekolah tersebut dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolahnya. Salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan MBS dapat diidentifikasi. Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan penulis mengemukakan gejala problematis yang terjadi pada komite sekolah dalam mengembangkan koperasi adalah komite sekolah sebagai unit kewirausahaan di sekolah kurang maksimal dalam mengelola anggaran untuk meningkatkan mutu sekolah, usaha-usaha produksi komite sekolah kurang menggunakan partisipasi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat kurang berantusias dalam meningkatkan mutu sekolah, belum maksimal hubungan komite sekolah dengan pihak terkait (masyarakat dan wali siswa) dalam mengembangkan koperasi untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

Partisipasi masyarakat terhadap upaya komite sekolah mulai tumbuh karena adanya unit usaha-usaha pada level sekolah seperti koperasi simpan pinjam, ATK, perlengkapan seragam, sablon, percetakan/*offset* dan lain lain. Bahkan hal ini tidak hanya di lingkup sekolah saja, tetapi juga diperjualbelikan keluar sekolah. Hal inilah yang mewujudkan mutu sekolah yang semakin tahun semakin meningkat karena sebagian besar biaya operasional sekolah didapat dari koperasi sekolah.

Hasil dari unit usaha-usaha yang dibangun komite sekolah dari jaringan internal maupun jaringan eksternal yang di ikuti oleh partisipasi masyarakat diwujudkan

sebagai peningkatan sumber daya seperti tenaga pendidik, tenaga non kependidikan, dan sarana prasarana seperti kelengkapan kelas mulai dari LCD, proyektor, AC, dan lain-lain. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian studi kasus tentang "Optimalisasi Komite Sekolah dalam Pengembangan Koperasi Sekolah Di Bandar Lampung". Masalah dalam penelitian ini mengenai, peran komite sekolah dalam mengembangkan koperasi di SMP di kota Bandar Lampung selanjutnya masalah tersebut menjadi sebuah fokus masalah yaitu sebagai berikut: 1) Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah; 2) Peran komite sekolah ; 3) Upaya komite sekolah dalam mengembangkan koperasi di SMP di kota Bandar Lampung.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data dan sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data dari hasil wawancara kepada informan, dan data-data lainnya berupa dokumentasi arsip-arsip serta model kemitraan yang dikembangkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi partisipan, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan secara wawancara. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini adalah koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah simpulan. Pengecekan keabsahan data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah dialami oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu uji kredibilitas yang dengan memperpanjang masa penelitian (observasi), meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan, triangulasi dan *Member checks*.

## **Komite Sekolah**

### **1. Pengertian komite sekolah**

Secara resmi konsep komite sekolah mulai digulirkan sejak tanggal 2 April 2002 meskipun fungsinya yang secara spesifik lokal mungkin saja telah ada yang menjalankannya jauh lebih dahulu sebelumnya. Pembentukan komite sekolah juga didasarkan pada pasal 56 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai langkah penerapan dari keputusan Mendiknas Nomor

044/U/2002 dan pasal 56 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, di atas serta dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, diperlukan adanya suatu kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan orang tua. Hal ini penting, karena sekolah memerlukan partisipasi masyarakat secara universal dalam menyusun program yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibentuklah suatu wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Komite Sekolah.

## **2. Fungsi dan peran komite sekolah**

Komite sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menurut keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 adalah sebagai berikut. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/dunia usaha/organisasi/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.

Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Menggalang dan masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Adapun fungsi komite sekolah sudah di jelaskan diatas tidak terkecuali peran komite sekolah juga merupakan sinergi untuk meningkatkan mutu sekolah. Lembaga komite sekolah ini memiliki kedudukan yang kuat, karena telah termaktup dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Pasal 56 ayat 1, 2, 3 dan 4. Pasal 56 ayat 3.

Peran komite sekolah dalam mengembangkan koperasi dengan guru maupun dengan pihak terkait (masyarakat) sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu sekolah melalui usaha-usaha yang di laksanakan komite sekolah. Menurut Hasbullah (2010:92) “secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut. Komite sekolah/ madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan

dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Wadah Komite Sekolah**

Partisipasi masyarakat juga merupakan bagian konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang akan memberikan jaminan pelibatan *stakeholders* pendidikan dalam mendukung proses pendidikan secara lebih luas. Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. "Itulah sebabnya maka paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama" (Hasbullah 2010:93).

### **4. Hubungan Sekolah dan Masyarakat**

Istilah hubungan sekolah dengan masyarakat, menurut Oemi Abdurrachman (Suryosubroto, 2004: 155) ialah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, *good will*, kepercayaan, penghargaan dari publik sesuatu badan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menurut Ibnu Syamsi (Suryosubroto, 2004: 155) "hubungan dengan masyarakat adalah untuk mengembangkan opini publik yang positif terhadap suatu badan, publik harus diberi penerangan penerangan yang lengkap dan obyektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga dengan demikian akan timbul pengertian darinya". Selain itu pendapat-pendapat dan saran-saran dari publik mengenai kebijaksanaan badan itu harus diperhatikan dan dihargai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah.**

Temuan peneliti, komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah awalnya dari kinerja komite sekolah yang melibatkan otonomi sekolah, seperti komite sekolah, kepala sekolah, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat. Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah yaitu membangun unit usaha yang berbagai macam unit

usaha untuk meningkatkan mutu sekolah diantaranya unit usaha komite sekolah yaitu: koperasi simpan pinjam, ATK, perlengkapan seragam/konveksi mikro, sablon, percetakan/*offset* dan lain lain

1. Unit usaha koperasi simpan pinjam adalah unit usaha yang dibangun komite sekolah. Unit usaha ini dapat mengakomodir beberapa keperluan warga sekolah, bahkan bisa dari luar dengan ketentuan tertentu. Laba dari unit usaha digunakan sebagai fasilitas sarana dan prasarana sekolah.
2. Unit usaha penyediaan ATK, adalah unit usaha komite sekolah yang dipasarkan di sekolah yang membutuhkan. Laba unit usaha ini dapat digunakan sebagai tambahan fasilitas sarana dan prasarana di sekolah.
3. Unit usaha konveksi mikro yang dibangun komite sekolah dipasarkan ketoko-toko diluar sekolah, karena unit usaha ini banyak manfaatnya, laba dari unit usaha ini dapat digunakan sebagai tambahan dana untuk kegiatan sekolah.
4. Unit usaha percetakan merupakan unit usaha yang dibangun koperasi sekolah dan dikelola oleh anggota komite sekolah dan sebagai tenaga pendidik. Unit koperasi sekolah ini memberi pelayanan siswa dan tenaga pendidik, buku paket, lembar kerja siswa dikelola oleh koperasi sekolah. Laba unit usaha koperasi sekolah tidak seperti unit usaha lain, usaha koperasi mengambil laba yang sedikit, sehingga laba dari unit usaha koperasi sekolah sebagai tambahan dana kegiatan sekolah.

Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah mempunyai dua sasaran pokok bagi sekolah sendiri dan siswa SMP di kota Bandar Lampung. Bagi sekolah dari laba usaha atau produksi digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah, dan bagi siswa untuk lapangan praktek karena sesuai dengan sekolah kejuruan, sehingga praktek lapangan bisa dilakukan di lingkup sekolah. Ini sejalan oleh Depdiknas (1998:5) dalam buku "pedoman pembinaan pengembangan koperasi sekolah di sekolah" sebagai berikut. Dalam rangka menumbuhkan koperasi sekolah pada lembaga sekolah hendaknya diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu siswa dan lembaga sekolah. Pengembangan sikap kewirausahaan pada siswa dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan koperasi sekolah melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan atau

ekstrakurikuler, yang dapat dimanfaatkan di masyarakat kelak. Sedangkan pengembangan koperasi sekolah bagi lembaga sekolah dapat ditempuh dengan mendirikan badan usaha yang menghasilkan laba (*profit taking*), yang dapat digunakan untuk menunjang biaya proses pendidikan. Melalui cara tersebut, diharapkan lembaga sekolah lebih bergairah dan produktif, menyejahterakan sivitas sekolah, serta siswa memiliki bekal kecakapan hidup (*life skills*).

Berdasarkan hasil data wawancara dan observasi, peneliti berpendapat untuk langkah ke depan dalam pengembangan unit koperasi sekolah yang dibangun oleh komite sekolah adalah; (a) komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah harusnya juga melibatkan siswa, seperti unit usaha yang di miliki mengarah pada kejuruan yang ada sehingga siswa-siswi SMP di kota Bandar Lampung ikut andil di usaha-usaha yang dibangun komite sekolah, sebagai contoh untuk lapangan praktik bagi siswa agar menciptakan jiwa kewirausahaan sekolah bagi siswa-siwi, (b) Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah harus pandai memanfaatkan peluang, mencari potensi baik itu sumber daya manusia maupun tempat. Depdiknas (1998:5) dalam buku “pedoman pembinaan pengembangan koperasi sekolah di” menjelaskan bahwa. Potensi-potensi tersebut kemudian dianalisis dengan cermat, sehingga dapat dipilih jenis usaha produksi/jasa yang paling tepat yang dipercaya efektif dan berkembang ke depan, serta menentukan tindakan yang tepat untuk mengimplementasikannya.

## **B. Peran Komite Sekolah**

Berdasarkan temuan penelitian peran komite sekolah di SMP di kota Bandar Lampung ini kurang maksimal sehingga terjadi kendala kendala indikator peran komite tidak maksimal, karena komite sekolah disini hanya berkecenderungan pada indikator peran komite sekolah sebagai badan pendukung, seperti yang diungkapkan oleh kepala komite sekolah komite sekolah diSMP ini, itu sudah berjalan dengan semestinya tapi masih kurang maksimal dari keempat peran komite sekolah yang semestinya sebagai berikut.

1. Peran pertama sebagai pertimbangan, disini komite SMP di kota Bandar Lampung sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh

sekolah, misalnya dalam hal rehab sarana dan gedung yang rusak, mendirikan musholah dan rencana pembangunan laboratorium media komputer. Selain itu, komite mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah.

2. Peran kedua pendukung ini merupakan keaktifan dari komite sekolah wujudnya seperti membangun unit usaha yang dibangun oleh komite sekolah, merupakan dukungan finansial, tenaga, dan pikiran. Pikiran yang diberikan komite sekolah, seperti adanya unit usaha sebagai peningkatan mutu sekolah. Unit usaha komite sekolah ini digunakan sebagai fasilitas sarana dan prasarana sekolah, sebagai biaya kegiatan sekolah. Komite sekolah di SMP di kota Bandar Lampung ini juga melihat anggaran sekolah karena sebagian besar dana diperoleh dari unit usaha komite sekolah. Ini sejalan dengan indikator peran komite sekolah sebagai pendukung.
3. Peran sebagai pengontrol, setiap satu bulan sekali selalu rapat, laporan perkembangan sekolah, perkembangan sekolah ini meliputi tenaga pendidik, sarana prasarana, keadaan siswa dan perkembangan usaha, dan laporannya itu berupa LPJ.
4. Peran sebagai mediator, pemerintah, sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat, menampung aspirasi-aspirasinya beliau, sebagai masukan pendapat dari mereka semua itu untuk pembenahan menuju sekolah yang bermutu. Komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah.

Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Ini sejalan dengan Ace Suryani dan Dasim Budimansyah (dalam Hasbullah, 2010:96) dari aspek manajemen pendidikan, perencanaan, pelaksanaan program dan pengelolaan program. Dari indikator kinerja menjadi penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, dan komite sekolah dengan dewan pendidikan mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan, membuat usulan kebijakan dan

program pendidikan kepada sekolah, mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat, memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah, menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah, mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah. mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah, mengidentifikasi sumber daya masyarakat, memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah, mengkoordinasikan bantuan masyarakat Komite sekolah diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002.

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Anggota-anggota komite sekolah terdiri dari kepala sekolah dan dewan guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Komite sekolah di SMP di kota Bandar Lampung tidak selalu berorientasi pada uang, tetapi juga pada hal-hal yang dapat diadakan bersama, seperti membentuk sistem belajar yang baik, turut serta memecahkan persoalan-persoalan yang ada dan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang dapat dikerjakan bersama tanpa harus mengeluarkan uang. Komite sekolah ini sangat mendorong tumbuhnya perhatian kepada masyarakat terhadap peningkatan mutu sekolah.

Hal ini sejalan dengan keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/dunia usaha atau organisasi/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Menggalang dan masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.



### C. Upaya Komite Sekolah dalam Mengembangkan koperasi

Berdasarkan temuan penelitian upaya yang di lakukan oleh SMP di kota Bandar Lampung adalah temuan melibatkan kepala sekolah, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan melibatkan masyarakat sebagai pekerja unit usaha komite sekolah, mendirikan paguyuban wali murid dengan pengembangan unit usaha. Menurut Hasbullah (2010:93) “Partisipasi masyarakat juga merupakan bagian konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang akan memberikan jaminan pelibatan *stakeholders* pendidikan dalam mendukung proses pendidikan secara lebih luas”. Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya maka paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama.

Dengan demikian keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dalam wujud komite sekolah mengembangkan koperasi merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan kemandirian sekolah. Menurut Mulyasa (2004:27) menjelaskan “MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih”. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat, dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen berbasis sekolah.

Oleh karena itu komite sekolah SMP di kota Bandar Lampung ini sejalan dengan teori Hasbullah. Dengan demikian keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan komite mengembangkan koperasi untuk meningkatkan mutu sekolah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan kemandirian sekolah. Menurut Mulyasa (2004:27) menjelaskan “MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih”.

Untuk kepentingan tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat, dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen berbasis sekolah, bahwa dalam meningkatkan mutu sekolah atau penyelenggaraan pendidikan melalui upaya yang dibangun komite sekolah melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dengan mempromosikan unit usaha komite sekolah. Sehingga komite sekolah tidak hanya semata-mata sebagai nama komite sekolah semata. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat. Dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Mulyasa (2006: 50) menyatakan "hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah".

Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Dewasa ini, paradigma lama ini dalam batas-batas tertentu telah ditinggalkan, keluarga memiliki hak untuk mengetahui tentang apa saja yang diajarkan oleh guru di sekolah. Orang tua siswa memiliki hak untuk mengetahui dengan metode apa anak-anaknya diajar oleh para guru.

Pengertian hubungan masyarakat di atas, sedikitnya ada dua kepentingan dalam manajemen pendidikan. Pertama, kepentingan sekolah, yang dapat dilihat dari pemberian informasi dari pihak sekolah kepada masyarakat, sehingga masyarakat membentuk opini tersendiri terhadap sekolah. Kepentingan lain agar sekolah dapat mengerti berbagai sumber yang ada dalam masyarakat yang dapat didayagunakan untuk kepentingan belajar mengajar dan usaha pendidikan pada umumnya. Kedua, dilihat dari segi kepentingan masyarakat, maka masyarakat dapat mengambil manfaat dan menyerap hasil-hasil pemikiran dan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat itu sendiri. Pengertian, penerimaan dan pemahaman masyarakat akan membentuk persepsi masyarakat terhadap sekolah.

Berdasarkan temuan peneliti berpendapat upaya komite sekolah dalam mengembangkan koperasi sudah sejalan dengan teori diatas hubungan masyarakat terhadap sekolah sangat terjalin baik, karena partisipasi masyarakat, orang tua siswa, hubungan masyarakat diwujudkan dalam mengembangkan koperasi untuk peningkatan mutu sekolah. Akan tetapi peneliti menyarankan untuk membangun usaha juga melibatkan para siswa yang sesuai bidang kejuruannya.

Adapun manfaat koperasi sekolah bagi siswa yang telah dijelaskan menurut Depdiknas, (2001:4-5) menjelaskan sebagai berikut. Pengembangan koperasi sekolah sekolah juga diharapkan memberikan keuntungan kepada siswa, dimana dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan koperasi sekolah dan manajerial tingkat sederhana untuk mengelola dan memasarkan suatu produk, dalam bentuk kurikuler, dan aktra kurikuler.

Agar lebih efektif, maka siswa juga hendaknya terlibat aktif terlibat secara langsung dalam pengembangan unit produksi/jasa sekolah atau, bekerja sama dengan instansi mitra lain terkait melalui program pendidikan sistem ganda atau *dual system education*. Melalui pola ini, selain siswa dapat mempraktekan pendidikan dan pelatihan teoritis terhadap dunia nyata sebenarnya, juga dapat menemukan kendala serta peluang dan atau menemukan ide-ide usaha baru yang lebih baik ke depan.

Menurut Depdiknas (2001:9) menjelaskan sebagai berikut. Pada akhirnya nanti, jika mereka lulus atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi memiliki alternatif-alternatif dalam meniti masa depannya, terutama mampu menciptakan lapangan kerja terutama bagi dirinya sendiri serta berpartisipasi menggerakkan ekonomi masyarakat sesuai kondisi lingkungan fisik dan sosio budaya di masyarakatnya. Sehingga, pada diri siswa akan tertanam minat minat dan kemampuan untuk berpartisipasi membangun secara nyata daerah atau lingkungannya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Komite sekolah sebagai unit koperasi sekolah mempunyai unit usaha yang berbagai macam unit usaha untuk meningkatkan mutu sekolah. Diantaranya unit koperasi sekolah yang dibangun komite sekolah yaitu, unit koperasi

simpan pinjam, ATK, perlengkapan seragam, sablon, percetakan/*offset* dan lain lain. Peran komite sekolah dalam menjalankan indikator kinerja komite sekolah, ada empat peran komite sekolah yaitu sebagai pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai pengontrol dan sebagai mediator.

Dari keempat peran komite sekolah tersebut, perlu ada peran perlakuan khusus terhadap komite sekolah yang kurang maksimal dan dianggap peran yang paling dimudah atau remehkan oleh komite sekolah di SMP di kota Bandar Lampung. Upaya komite sekolah dalam mengembangkan koperasi yaitu melibatkan partisipasi kepala sekolah, partisipasi tenaga pendidik, partisipasi orang tua siswa, dan masyarakat, mendirikan paguyuban wali murid, dan menyebarkan promosi dengan media massa seperti *brosur dan spanduk*, mengadakan kerjasama dengan unit usaha luar. Kedepan, diharapkan penelitian ini menjadi referensi dan informasi dalam melakukan penelitian di bidang yang sama tentang peran komite sekolah dalam mengembangkan koperasi, dengan melibatkan partisipasi orang tua siswa dan partisipasi masyarakat sehingga antara komite sekolah dan hubungan masyarakat berperan dalam mewujudkan mutu sekolah. Semoga penelitian ini dijadikan bahan pustaka dalam mengerjakan laporan, dan peneliti berharap agar mengembangkan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Peneitian*. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwin. 2010. *Otonomi Manajemen Sekolah*. Bandung: ALFABETA.
- Depdiknas. 1998. *Koperasi sekolah (Enterpreneurship) dalam Pendidikan: Materi Pelatihan Calon Kepala Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
- Depdiknas. 2001. *Pedoman Pembinaan Pengembangan Koperasi sekolah Siswa SMK*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
- Depdiknas. 2003. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Hasbullah. 2010. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995. *Tentang Gerakan Nasional Dan Membudayakan Koperasi sekolah*. Jakarta.  
[http://Inpres\\_1995\\_004Kewirausahaan.go.id/pdf](http://Inpres_1995_004Kewirausahaan.go.id/pdf) di akses 20 Agustus 2015
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002. *Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah*. Jakarta. <http://kepmendiknas-004-tahun2002.go.id/pdf> di akses 20 Agustus 2015
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursidi, Ali. 2010. *Pengelolaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Tarbiyah IAIN.
- Rohmah, Nailur. 2010. *Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Tarbiyah UTN.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tim prima pena. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS)*. Jakarta: Cemerlang.
- Zimmerer, Thomas W, Norman M. Scarborough, dkk. 2008. *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. Koperasi sekolah dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta. Salemba Empat.
- Zunaidi, Arif. 2009. *Peranan Komite Sekolah dalam Pembelajaran PAI di SMP Islam Ngebruk Sumber Pucung Malang pada Manajemen Berbasis Sekolah*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Tarbiyah UTN.



# Jurnal Aplikasi Manajemen

<http://jurnaljam.ub.ac.id>

Home About Login Register Search Current Archives Announcements

Home > Vol 14, No 2 (2016)

## Jurnal Aplikasi Manajemen

Selamat datang di Jurnal Aplikasi Manajemen yang diterbitkan oleh Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Asosiasi Ilmuwan Manajemen. Untuk informasi mengenai pengiriman artikel atau informasi lainnya silakan menghubungi kami.

## Announcements

### Publikasi Jurnal JAM

Saat ini jurnal JAM sedang dalam proses updating data...

Posted: 2012-05-07

More...

More Announcements...

## Vol 14, No 2 (2016)

## Table of Contents

### Articles

Kebijakan Harga dan Kebijakan Distribusi dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Urea  
*Subhan, Ujang Sumarwan, Anet Daryanto, Kibrandoko*



pp.  
193-  
200

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan  
*Anwar Hamdani, I Gusti Putu Diva Awatara*



pp.  
201-  
208

Kajian Ekonomi Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Cakalangdi Pantai Utara Aceh  
*Agus Naufal, Tridoyo Kusumastanto, Achmad Fahrudin*



pp.  
209-  
216

Perancangan Model Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusiadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  
*Andita Sayekti, Lindawati Kartika*



pp.  
217-  
232

Studi Usaha Perikanan di Kawasan Terumbu Pulau Sagoni Sulawesi Tenggara  
*Bobby Afyudi, Achmad Fahrudin, Handako Adi Susanto*



pp.  
233-  
240

Kajian Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Bina Swadaya Nusantara dan Usaha Mikro Perempuan Binaannya dengan Model ASA



<http://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/index>

### Open Journal Systems

### Journal Help

### User

Username

Password

Remember me

Login

### Notifications

- View
- Subscribe

### Journal Content

Search

Search Scope

Search

### Browse

- By Issue
- By Author
- By Title


### Information

- For Readers
- For Authors
- For Librarians

	253
 <b>Kajian Evaluasi Pelatihan Program Pengembangan Manajemen</b> <i>Endah Nurani, Aji Hermawan, Aida Vitayala Hubeis, Nurmala K. Panjaitan</i>	 pp. 254- 266
 <b>Pengaruh Learning Organization, Kualifikasi Pendidikan, dan Pengalaman Kerja terhadap peningkatan Kinerja Karyawan di Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) Bogor Khususnya di Bidang Pelayanan Publik</b> <i>Nur Hasbullah Matturungan, Ria Kumtawati, Anggraini Sukmawati</i>	 pp. 267- 271
 <b>Analisis Karakteristik Obligasi terhadap Return Obligasi pada Sub Sektor Perbankan Tahun 2010–2013</b> <i>Resandy Herlambang, Nunung Nurartono</i>	 pp. 272- 280
 <b>Analisis Pengaruh Kebijakan Pembatasan Loan to Value terhadap Return dan Risiko Saham Perbankan di BEI Tahun 2012–2013</b> <i>Riony Rihardhika Purnama, Trias Andali</i>	 pp. 281- 290
 <b>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen dalam Upaya Meningkatkan Pembelian (Studi di Travel PT Anugrah Tanjung Tabalong)</b> <i>M. Hartie</i>	 pp. 291- 299
 <b>Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Dokter dalam Kelengkapan Pengisian Rekam Medis dengan di Moderasi Karakteristik Individu (Studi di Rumah Sakit Islam Unisma Malang)</b> <i>Cicilia Lihawa, Noermijati, Harun Al Rasyid</i>	 pp. 300- 321
 <b>Pengaruh Budaya Keselamatan Pasien terhadap Sikap Melaporkan Insiden pada Perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Tk. II dr. Soepraoen</b> <i>Dewi Anggraeni, Ahsan, Misbahuddin Azzuhri</i>	 pp. 309- 321
 <b>Pengaruh Employee Engagement terhadap Kepuasan Kerja dan Turnover Intention Perawat (Studi pada Rumah Sakit Wawa Husada Kapanjen Malang)</b> <i>Luthi Rachman, Aryo Dewanto</i>	 pp. 322- 333
 <b>Indikator Membangun Good Cooperative Governance, untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Koperasi, Studi di Kota Medan</b> <i>Karlonta Nainggolan, Tohap Parulian, Ali Usman Siregar</i>	 pp. 334- 343
 <b>Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan dan Jumlah Dewan Komisaris sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia)</b> <i>Ayu Kemala Putri, Made Susanna, Bambang Purnomosidhi</i>	 pp. 344- 358
 <b>Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)</b> <i>Febrianto Frans Deni, Siti Aisjah, Atim Djazuli</i>	 pp. 359- 365
 <b>Terhadap Customer Satisfaction Melalui Purchase Decision dan Fashion Interest dalam Pembelian Handbag Imitasi (Studi pada Mahasiswa di Kota Malang)</b> <i>Ike Cindia, Fatchur Rochman, Sunaryo</i>	 pp. 366- 372
 <b>Pengaruh Kesadaran Merek dan Asosiasi Merek terhadap Ekuitas Merek pada Pelanggan Hypermarket di Kota Malang</b> <i>Putri Wahyu Ermawati, Achmad Sudiro, Nur Khusmyah</i>	 pp. 373- 386

10/6/2016

Jurnal Aplikasi Manajemen

 The influence of Voluntary Disclosure, Asymmetri Information, Stock Risk, Firm Size and Institutional Ownership Towards Cost of Capital (COC)

*Restu Fahdiansyah*



pp.  
387-  
400



Jurnal Aplikasi Manajemen by Universitas Brawijaya in cooperation with Indonesian Management Scientist Assosiation (AIMI) is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International License.